

TESIS

**POSISI MAHASISWA DALAM PROSES KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
JALAN POROS SALUTAMBUNG-ARALLE DI SULAWESI BARAT**



*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi
gelar magister ilmu politik pada Departemen Ilmu Politik*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Oleh:

Nama : Muhammad Gaus

Nim : E052202007

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

POSISI MAHASISWA DALAM PROSES KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JALAN
POROS SALUTAMBUNG-ARALLE DI SULAWESI BARAT

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD GAUS

Nomor Pokok : E052202007

Program Studi : Ilmu Politik

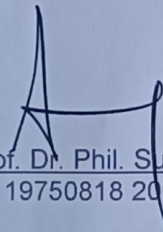
Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir
Pada Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

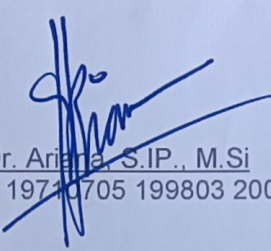
Makassar, 3 Juli 2023

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

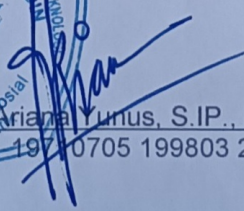

Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si
NIP. 19750818 200801 1 008


Dr. Ariana, S.IP., M.Si
NIP. 19710705 199803 2002

Mengetahui,

Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik




Ariana Yunus, S.IP., M.Si
NIP. 19710705 199803 2002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Gaus
NIM : E052202007
Program Studi : Magister Ilmu Politik
Jenjang : Strata 2 (S2)

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul **Posisi Mahasiswa Dalam Proses Kebijakan Pembangunan Jalan Poros Salutambung-Aralle Di Sulawesi Barat.**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Tesis karya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka bersedia menerima sanksi

Makassar, 19 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



--Muhammad Gaus

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Oleh karena petunjuk dan karunianya sehingga penyusunan tesis dengan judul “ Posisi Mahasiswa Dalam Proses Kebijakan Pembangunan Jalan Poros Salutambung-Aralle di Sulawesi Barat”, dapat diselesaikan dengan baik. selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kekasih Allah SWT, sang pembawa panji-panji kebenaran yang senantiasa kita teladani. Oleh karena ajaran beliau sehingga kita mengerti derajat dan pentingnya ilmu pengetahuan.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Hasanuddin. Dalam proses penyusunan tesis, berbagai pihak telah banyak memberikan sumbangsi pemikiran dan motivasi, yang bagi penulis sangat tak ternilai harganya. Semoga semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan hingga selesai, dicatat sebagai amal dan mendapat ganjaran yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari tesis yang telah disusun, sebab keterbatasan ilmu pengetahuan penulis, oleh karena itu penulis sangat terbuka atas kriti-k dan saran dari semua pihak, demi penyempurnaan tulisan kedepan.-

Tak lupa pula penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada keluarga besarku yang telah memb-erikan dukungan secara penuh. Tesis ini saya persembahkan untuk ayahanda **Budiamin, S.Pd**, dan ibunda **Sapira, S.Pd**, dari lubuk hati terdalam saya mengucapkan terimakasih, sebab langkahku selalu disertai do'a yang dilangitkan setiap waktu demi kelancaran urusan penulis. Untuk -adikku **Gailam Adi Masqi** terimakasih atas dukungannya, teruslah tumbuh, berkembang dan menebar manfaat untuk semua.

Penulis menyadari bahwa tuli-san ini bisa diselesaikan dengan baik karena berkat bimbingan dari bapak **Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si** sebagai pembimbing utama dan ibu **Dr. Ariana, S.IP, M.Si**. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada keduanya sebab dengan bimbingan, petunjuk serta arahan dari mereka sehingga tesis ini dapat disusun dengn baik.

Selanjutnya penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis sehingga Tesis ini bisa selesai dengan baik. Olehnya itu saya ingin mengucakan terimakasih kepada

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

3. **Ibu Dr. Ariana, S.IP., M.Si** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP UNHAS.
4. Kepada Bapak Ibu Dosen Prodi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin baik selama penulis mengikuti perkuliahan di S1 maupun S2 ini, Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si, Drs. H. A. Yakub, M.Si, Ph.D, Dr. Gustiana Kambo, M.Si, Dr. Ariana, M.Si, Haryanto, S.IP, MA, Dr. Sakinah Nadir, M.Si, Endang Sari, S.IP, M.Si, Dr. Muhammad Saad, MA, Ummi Suci Fathia, S.IP, M.Si, Muh. Imran, S.IP, M.Si, Zulhajar, S.IP, MA, Dian Eka waty, S.IP, M.Si. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga penulis dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
5. Seluruh staf khususnya Departemen Ilmu Politik, Serta staf administrasi pasca sarjana dilingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali.
6. Terimakasih kepada para informan yang telah terlibat dalam penelitian ini, khususnya kepada bapak DR. Muhammad Idris, DP, Lukman Nukman, S.Pd, M.Pd, Muhammad Arief, S.Pd, M.Si, Hartono, S.Pd, Dr. Mulyadi bintaha, S.Pd, M.Pd, Dalif Arsyad, Paharuddin S.sos, Aldi, ST, Saparang, ST. Terimakasih telah bersedia menjadi informan pada penelitian ini.
7. Keluarga besar Magister Ilmu Politik FISIP UNHAS angkatan 2021, Ray Suryadi Arsyad, Nu-rilira Goccing, Muh. Syafii syahrir Ruri Ramadhan, Amalia, Galank Pratama, Muhammad Fichriadi

Hastira, Andi Ulfatul Zahra, Kurnia Sulistiani, terimakasih atas dukungan dan dorongan selama perkuliahan. Terimakasih telah menciptakan sirkel yang konstruktif.

8. Keluarga besar AMANDEMEN 14 yang selalu memberikan dukungan mulai berorientasi di kampus hingga kini tetap solid dan saling mendukung.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat menjadi masukan yang positif bagi bagi seluruh elemen terutama untuk pengembangan kajian ilmu poliik dikemudian hari. Aamiin yarabbal alamin

Makassar 20 juli 2023

Muhammad Gaus

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	X
1.1. Latar belakang	1
1.2. Rumusan masalah	8
1.3. Tujuan penelitian.....	8
1.4. Manfaat penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Defenisi gerakan sosial	10
2.2. Teori gerakan sosial	12
2.2.1. Aspek pengorganisasian	14
2.2.2. Aspek pertimbangan	14
2.2.3. Aspek daya tahan.....	15
2.3. Teori gerakan sosial baru.....	15
2.3.1. Karakteristik gerakan sosial baru	18
2.4. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan dan Kegagalan Gerakan Sosial.....	26
2.4.1. <i>Leadership: Effective Leadership</i> (Kepemimpinan: Kepemimpinan yang Efektif).....	26
2.4.2. <i>Image: Positive Image</i> (Citra: Citra Psoitif)	27
2.4.3. <i>Tactics: Socially Accepted Tactics</i> (Taktik: Taktik yang Dapat Diterima secara Sosial).....	28
2.4.4. <i>Goals: Socially Acceptable Goals</i> (Tujuan: Tujuan yang Dapat Diterima Secara Sosial)	28
2.5. Penelitian terdahulu.....	30
2.4. Skema pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1. waktu dan lokasi penelitian	35
3.2. Jenis dan Desain penelitian	35
3.3. Jenis dan sumber data.....	36

3.4.	Teknik pengumpulan data	36
3.5.	Teknik Analisis Data	39
3.6	Reduksi data	40
3.7.	Kesimpulan / Verifikasi.....	40
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		42
4.1.	Sejarah Sulawesi Barat	42
4.2.	Pembentukan Sulawesi Barat.....	45
4.3.	Pemerintahan.....	47
4.4.	Demografi.....	49
4.5.	Profil kecamatan Ulumanda	52
4.5.1.	Penduduk.....	53
4.5.2.	Pertanian, peternakan dan perikanan.....	55
4.5.3.	Kesehatan.....	56
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....		57
5.1.	Bentuk-bentuk gerakan Mahasiswa	57
5.1.1.	Aspek pengorganisasian	57
5.1.2.	Aspek pertimbangan	73
5.1.3.	Aspek daya tahan.....	78
5.2.	Pengaruh gerakan Mahasiswa.....	80
5.2.1	Respon Masyarakat	81
5.2.2.	Respon Anggota Legislatif	84
5.2.3.	Tanggapan Pemerintah Kabupaten Majene	89
5.2.4.	Tanggapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.....	92
5.3.	Implikasi teori	96
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....		102
6.1.	kesimpulan	102
6.1.1.	Bentuk pengorganisasian gerakan	102
6.1.2.	Aspek pertimbangan	103
6.1.3.	Aspek daya tahan gerakan	104
6.1.4.	Pengaruh gerakan Mahasiswa.....	104
6.2.	Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....		107

ABSTRAK

MUHAMMAD GAUS. Posisi Mahasiswa dalam Proses Kebijakan Pembangunan Jalan Poros Salutambung -- Aralle di Sulawesi Barat (dibimbing oleh Sukri dan Ariana).

Kehadiran mahasiswa dalam arena kebijakan publik merupakan perwujudan dari kelompok penekan. Mahasiswa sebagai kelompok penekan dapat diidentifikasi dari bentuk-bentuk gerakan yang mereka lakukan untuk memengaruhi suatu kebijakan. Salah satu bentuk kehadiran mahasiswa dalam arena kebijakan, yakni dalam upaya mendorong implementasi kebijakan pembangunan jalan poros Salutambung -- Aralle di Sulawesi Barat. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam upaya mendorong implementasi kebijakan pembangunan jalan poros Salutambung -- Aralle. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Dalam penelitian ini terdapat beberapa informan yang terbagi dalam beberapa elemen antara lain; elemen mahasiswa, masyarakat, anggota legislatif, Pemerintah Kabupaten Majene, serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Untuk mendapatkan data, digunakan metode wawancara mendalam dan dokumentasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun teori yang digunakan adalah teori gerakan sosial untuk menganalisis hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mahasiswa dalam mendorong implementasi kebijakan pembangunan jalan poros Salutambung -- Aralle dapat dilihat dalam tiga indikator gerakan sosial, yakni (1) indikator pengorganisasian bahwa mahasiswa dalam upaya tersebut melakukan pengidentifikasian masalah, penentuan *grand* isu, melakukan konsolidasi dan pembentukan aliansi sebagai titik berangkat dalam melakukan pengawalan isu tersebut; (2) indikator pertimbangan bahwa aliansi mahasiswa yang telah terbentuk berupaya untuk menarik sebanyak mungkin dukungan dari luar sehingga beberapa organisasi memutuskan untuk bergabung dengan berbagai alasan rasional; dan (3) indikator aspek daya tahan bahwa pengawalan isu pembangunan jalan tersebut telah berlangsung lama sehingga dapat dilihat bagaimana konsistensi mahasiswa dalam mengadvokasi pembangunan jalan poros Salutambung -- Aralle.

Kata kunci: gerakan mahasiswa, implementasi kebijakan, pembangunan jalan



ABSTRACT

MUHAMMAD GAUS. *The Position of Students in the Policy Process of Salutabung-Aralle Axis Road Development in West Sulawesi* (supervised by Sukri and Ariana)

The presence of students in the public policy arena is a manifestation of pressure groups. Students as a pressure group can be identified from the forms of movement they take to affect a policy. One form of student presence in the policy arena is in an effort to encourage the implementation of the Salutabung-Aralle axis road development policy in West Sulawesi. This research aims to find out and analyse the forms of movement carried out by students in an effort to encourage the implementation of the Salutabung-Aralle axis road development policy. The research used was a qualitative research method with a descriptive analysis design. There were several informants who were divided into several elements including student elements, the community, legislative members, Majene District government, and the government of West Sulawesi Province. To obtain data, in-depth interview and documentation methods related to this research were used. The theory used was social movement theory to analyze the research results. The results show that students' efforts in encouraging the implementation of the Salutabung-Aralle axis road construction policy can be seen in three indicators of social movements. The first is organizing indicator, in which the students in this effort identify problems, determine grand issues, consolidate and form alliances as a starting point in guarding the issue. The second is consideration indicator, in which the student alliance that has been formed seeks to attract as much support as possible from outside, so several organizations decide to join with various rational reasons. The third indicator is the durability aspect, in which the escort of the road construction issue has been going on for a long time that shows how consistent students are in advocating the construction of the Salutabung-Aralle axis road.

Keywords: student movement, policy implementation, road development



BA0B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Kebijakan merupakan hasil akhir dari sebuah proses sistem politik. Kebijakan adalah serangkaian keputusan dari para pemangku kebijakan yang dikeluarkan setelah melalui proses. Mulai dari memetakan masalah kebijakan di masyarakat kemudian melalui proses pembahasan oleh lembaga politik resmi(eksekutif dan legislative) di parlemen, kemudian hasil akhir dari pembahasan adalah berupa kebijakan. Hasil akhir tersebut akan kembali mendapat *feedback* dari masyarakat sebagai objek kebijakan. Respon dari masyarakat akan menjadi rujukan awal untuk menyempurnakan kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Salah satu aspek yang menentukan proses kebijakan itu bekerja adalah adanya *input* atau masukan dari semua stakeholder, sebagai bahan atau referensi dalam menentukan kebijakan yang cocok untuk masyarakat. Khususnya di negara kita yang memilih sistem demokrasi, berdasarkan konsepnya secara umum yakni pemerintahan rakyat. Maka seyogyanya kebebasan berpendapat dijamin dan dilindungi. Kebebasan mengeluarkan pendapat dimuka umum diekspresikan oleh masyarakat dengan warna dan jalan yang berbeda-beda. Salah satu bentuknya adalah tuntutan dari para mahasiswa dalam memperjuangkan kebijakan tertentu.

keterlibatan masyarakat sebagai objek kebijakan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. Kemudian sebuah kebijakan yang telah dirumuskan, harus segera di implementasikan karena yang lebih penting dari sebuah kebijakan adalah pengimplementasiannya. Implementasi kebijakan dianggap sangat krusial karena implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya¹. Implementasi kebijakan dalam konsep Van Metter Van Horn adalah suatu usaha untuk merubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurung waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan².

Agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan tepat waktu, maka masyarakat sebagai objek kebijakan biasanya melakukan tekanan terhadap implementator kebijakan dalam hal ini pemerintah. Apabila politisasi suatu permasalahan dilakukan oleh kalangan masyarakat seperti individu atau kelompok maka ia dapat berupa imbauan atau tuntutan agar pemerintah menaruh perhatian terhadap permasalahan yang menjadi kepentingannya itu³. Salah satu elemen masyarakat yang sering mengambil peran sebagai kelompok penekan adalah para mahasiswa. Salah satu tujuan gerakan yang

¹ Hayat dkk. *Reformasi Kebijakan Publik*, 2020, Jakarta: Kencana, Hal. 91

² Ibid. hal.92

³ Ramlan Surbakti, 2010, *Memahami Ilmu politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, hal.252

mereka lakukan sebagai bentuk upaya mendorong implementasi kebijakan.

Argumen di atas dipertegas bahwa salah satu komponen dalam masyarakat yang bisa berperan lebih bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia adalah pemuda dan mahasiswa⁴. Peran mahasiswa sebagai pengawas dari suatu pembangunan harus bisa menonjol karena mahasiswa dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, sehingga mereka yakin bahwa mahasiswa mampu menyampaikan aspirasi sebagai bentuk suara hatinya. Mahasiswa diyakini memiliki peran strategis dalam menyampaikan aspirasi masyarakat karena dibekali dengan kemampuan pemikiran yang kritis dan analitis serta keberanian jika kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan kebutuhan dan keinginan rakyat.

Muhtar masoed menjelaskan bahwa mahasiswa merupakan makhluk yang istimewa. Secara biologis istimewa, Karena mereka berada pada lapisan unsur yang memungkinkan untuk menjadi *energetic* dan cocok untuk menjadi pelopor perubahan keadaan⁵. Mahasiswa dan perubahan hampir tak bisa dipisahkan, terutama perubahan dan pembangunan di negeri kita. Hal demikian menjadi alasan kuat bahwa posisi mahasiswa perlu diperhitungkan dalam setiap arena pengambilan kebijakan.

⁴ Arnan Muflihady Martadinata, 2019, Peran Mahasiswa Dalam Pembangunan Indonesia: *Jurnal Humaniora*, Vol.1, No.2, Hal.2

⁵ Muhtar Masoed dalam (Suliadai, 2012, Resistensi Mahasiswa Terhadap kebijakan Kampus Di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: *Sosiologi Reflektif*, Vol.6, No.2, hal-104).

Menurut Suriadi culla, sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa senantiasa berdiri pada garda terdepan pada setiap perubahan yang terjadi di Indonesia, sehingga karena peran kesejarahannya tersebut mahasiswa diperibahasakan generasi patah tumbuh hilang berganti⁶. Seperti kata pepatah hilang satu tumbuh seribu, begitulah mahasiswa bermetamorfosis dan berkembang mengawal aspirasi masyarakat. Mahasiswa berada pada tataran *civil society* yang menyandang gelar *Agen of change*, tetapi berdasarkan fungsinya lebih tepat menyandang sebagai kekuatan kelompok penekan Negara dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan sampai pada implementasinya.

Mahasiswa dalam memperjuangkan dan menyuarakan kepentingan masyarakat disebut sebagai kelompok penekan. Gerakan mahasiswa bisa kita lihat dalam mengawal isu nasional maupun isu lokal. contoh kasus persoalan kebijakam pembangunan jalan poros Salutambung-Aralle yang berada di kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat (Sul-Bar). Mahasiswa sudah sering melakukan langkah untuk memperjuangkan pembangunan jalan tersebut. Dari generasi ke generasi gerakan mahasiswa di Ulumanda selalu setia mengawal setiap isu kerakyatan tetapi isu pembangunan jalan merupakan hal yang fundamental yang selalu menajdi isu utama disetiap aksinya.

⁶ Suriadi Culla dalam (Aip Syarifuddin, 2017, Mahasiswa Sebagai pressure Group: Fenomena Silent Majority Di Era Reformasi: *SOSFILKOM*, Vol. XI. No.02, Hal-39).

Pada tahun 2012 aliansi mahasiswa yang tergabung kedalam aliansi masyarakat Ulumanda melakukan aksi di Jalan poros Majene-Mamuju tepatnya di desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda. aksi tersebut tak lain adalah mempertanyakan janji gubernur tentang pembangunan jalan poros Salutambung-Aralle. tepatnya tanggal 28 oktober tahun yang sama, mahasiswa Ulumanda melakukan aksi sebagai momentum memperingati sumpah pemuda, dibalut dengan isu utama yakni memperjuangkan pembangunan jalan ke Ulumanda. Mahasiswa dalam melakukan aksinya tidak hanya dari kalangan mereka, tetapi semua elemen masyarakat mendukung karena pembentukan aliansi dari desa ke desa dengan membawa isu dan kegelisahan yang sama.

Setelah itu, pada tanggal 18 Juni 2018 mahasiswa kembali melakukan aksi besar-besaran dengan nama aliansi Ulumanda bersuara dititik yang sama. Aksi mahasiswa tersebut menutup jalan sehingga membuat trans Sulawesi lumpuh total. Aksi ini dilatar belakangi oleh kekecewaan Mahasiswa terhadap progress pembangunan yang cenderung jalan ditempat. Seperti yang diberitakan oleh salah satu media online (TBNews)⁷. Senada dengan itu (mamujupos.com) memberitakan dengan mengutip sepenggal hasil wawancaranya, menurut salah satu massa aksi bahwa Demonstrasi kata dia, adalah sebagai cara mengetuk hati. “Bahwasanya, pemerintah

⁷ Tuntut Masalah Jalan, Aliansi Mahasiswa Lakukan Demo.

” <https://tribranews.sulbar.polri.go.id/tuntut-masalah-jalan-aliansi-mahasiswa-lakukan-demo/>

harus menyelesaikan problem jalan yang menjadi sumber dari segala permasalahan masyarakat hari ini”⁸.

Permasalahan ini adalah masalah ketimpangan sosial, ketidakadilan dan pengeksklusian masyarakat secara sengaja. Masalah pembangunan jalan yang sangat memprihatinkan serta kurang diperhatikan pemerintah setempat kerap dikeluhkan oleh warga di kecamatan Ulumanda, terutama saat musim penghujan tiba yang membuat jalan semakin parah. Hal demikian menstimulus para pemuda terutama dikalangan mahasiswa di kecamatan Ulumanda untuk bergerak, membentuk aliansi dan selanjutnya mempertanyakan persoalan kelanjutan pembangunan jalan tersebut. Mahasiswa kecamatan Ulumanda merasa terpanggil untuk memainkan perannya yaitu sekurang-kurangnya sebagai kelompok penekan atas pemerintah Sulawesi Barat dengan tujuan meminta kesediaan pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan jalan trans Salutambung-Aralle.

Sasaran tuntutan mahasiswa dalam isu kebijakan pembangunan jalan poros salutambung aralle adalah pemerintah provinsi Sulawesi Barat. hal demikian karena sejak tahun 2014 jalan ini telah berubah menjadi jalan strategis provinsi yang tertuang di dalam PERDA Sulawesi Barat No.1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2030. Lebih lanjut ketentuan itu diatur pada bagian ke tiga (rencana pengembangan sistem jaringan prasarana

⁸ Akses jalan rusak berat, ini tuntutan aliansi Ulumanda
"Mamujupos.com. "https://mamujupos.com/akses-jalan-rusak-berat-ini-tuntutan-
aliansi-ulumanda-bersatu".

utama, pasal 9 poin 1 bagian c, yaitu "Rencana pembangunan jalan penghubung antar ibu kota kabupaten/kota meliputi: Salubatu – Bonehau – kalumpang – batas kabupaten Luwu utara; kalumpang – Batuisi – batas kabupaten Tanah Toraja; Polewali – Tabone – Malabo; tikke – Batas provinsi Sulawesi Tengah; Lampa (Mapilli) – Matangga – Keppe; Salutambung- Urekang – Mambi. Berangkat dari aturan tersebut maka benarlh bahwa tanggung jawab pekerjaan jalan Salutambung – urekang- mambi yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut jalan Trans Salutambung-Aralle adalah tanggung jawab pemerintah provinsi Sulawesi Barat.

Penelitian ini difokuskan pada aspek gerakan mahasiswa dalam mendorong implementasi kebijakan pembangunan jalan poros Salutambung aralle yang diejawantahkan dalam PERDA No.1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sulawesi Barat tahun 2014-2030 di atas. Implementasi kebijakan merupakan arena penjelasa, bahwa penelitian ini berkaitan erat dengan pembangunan jalan salutambung-Aralle yang menjadi objek penelitian. Upaya mahasiswa dalam mempengaruhi implementasi kebijakan akan dilihat sebelum dan setelah Perda No. 1 Tahun 2014 di keluarkan oleh pemerintah Sulawesi Barat,.

Keterlibatan mahasiswa dalam isu kebijakan pembanguan jalan trans salutambung-aralle menarik diteliti, untuk melihat hubungan antara asumsi bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Apakah langkah yang telah ditempuh

oleh mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan jalan tersebut. Penelitian inipun menarik sebab hanya mahasiswa yang selalu menyuarakan dengan lantang persoalan pembangunan jalan tersebut.. Berangkat dari hal diatas maka penulis mengangkat judul “ *Posisi Mahasiswa Dalam Proses Kebijakan Pembangunan Jalan Poros Salutambung-Aralle di Sulawesi Barat* ”

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang tulisan ini maka rumusan masalah dibatasi pada:

Bagaimana upaya gerakan Mahasiswa dalam mendorong implementasi kebijakan pembangunan jalan poros Salutambung-Aralle?

1.3. Tujuan penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk gerakan yang dilakukan Mahasiswa dalam upaya mendorong implementasi kebijakan pembangunan jalan poros Salutambung-Aralle.

1.4. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun untuk masyarakat secara luas

1. Manfaat akademis

- a. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk dijadikan rujukan dalam mengembangkan penelitian ilmiah tentang gerakan sosial kedepannya.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran secara ilmiah melalui penelitian mengenai posisi mahasiswa dalam proses kebijakan pembangunan jalan poros Salutambung – Aralle.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan mampu menjadi stimulus untuk semua elemen masyarakat termasuk mahasiswa, bahwa mereka punya peran dalam mempengaruhi arah kebijakan.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi semua elemen masyarakat terutama bagi mereka yang fokus pada pengawalan pengawalan isu kerakyatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini dikerangkai dengan teori gerakan sosial, yang akan digunakan untuk membantu menganalisis data setelah penelitian. Teori yang digunakan akan melihat dari sudut pandang gerakan sosial secara umum dan gerakan sosial baru.

2.1. Defenisi gerakan sosial

Beragam pandangan yang dikemukakan oleh pemikir tentang defenisi gerakan sosial, hal ini menegaskan bahwa konsep gerakan sosial tidak manunggal, tetapi beraneka ragam sebagai suatu gejala sosial, diantara konsep gerakan sosial sebagai berikut; Pandangan ahli sosiologi dalam kamus sosiologi memberikan defenisi gerakan sosial adalah suatu aliansi sosial sejumlah besar orang yang berserikat untuk mendorong atau menghambat suatu segi perubahan sosial dalam suatu masyarakat⁹. Sedangkan Sindy Torrow mengatakan bahwa organisasi gerakan sosial didefenisikan sebagai kelompok yang memiliki kesadaran untuk bertindak, concern untuk mengungkapkan apa yang dilihatnya sebagai klaim-klaim yang menentang kelompok elit, penguasa, atau kelompok lain¹⁰.

Lebih lanjut Torrow mengemukakan bahwa elemen gerakan sosial dalam ranah perlawanan adalah; tantangan kolektif, tujuan

⁹ Muhammad Syawaluddin, *Sosiologi Perlawanan*, 2017, Yogyakarta: Deppublish, hal.30.

¹⁰ Ibid. Hal. 32

umum, solidaritas sosial, interaksi yang berkelanjutan dengan elit, lawan, dan otoritas¹¹. Jadi gerakan sosial yakni gerakan yang melakukan politik perlawanan/perseteteruan yang didasarkan pada sosial dan pemingkaian tindakan kolektif, dan selalu mengembangkan kapasitas untuk mempertahankan tantangan yang berkelanjutan terhadap lawan kuat.

Pandangan yang lain datang dari Giddens yang menyatakan bahwa gerakan sosial adalah upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau gerakan untuk mencapai tujuan bersama melalui aktor-aktor gerakan (*collective action*) di luar lingkup lembaga-lembaga yang sudah mapan¹². Adapun Doug dan McAdam dan David A. Snow mendefenisikan gerakan sosial sebagai suatu gerakan yang melakukan protes untuk satu tujuan bersama¹³. Beberapa ahli memposisikan gerakan sosial sebagai suatu gerakan perubahan yang dilakukan secara kolektif untuk mencapai tujuan ideal. Munculnya gerakan tersebut karena ada suatu kesenjangan yang dilakukan oleh kelompok dominan atau berkuasa. Gerakan sosial merupakan entitas dinamis terkadang bersifat non formal. Sisi lain ada juga yang memberikan pada aksi dan upaya kolektif untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka perubahan, gerakan mana yang dilakukan oleh kelompok di luar lingkungan lembaga-lembaga yang mapan.

¹¹ Muhammad Syawaluddin, Lok.cit

¹² Muhammad Syawaluddin, Lok.cit.

¹³ Ibid. Hal.34

Sementara Singh dalam gerakan sosial baru (GSB) pada dasarnya mengembangkan teori akar rumput, aksi-aksi dari akar rumput, gerakan mikro dari kelompok-kelompok kecil. Membidik isu-isu lokal dengan dasar kelembagaan yang terbatas dari struktur gerakan ditentukan oleh pluralitas tujuan, sasaran dan orientasi yang berbasis pada heterogenitas sosial.¹⁴ Sementara itu Zurcher dan Snow merumuskan definisi gerakan sosial sebagai kegiatan yang sifatnya kolektif yang mengekspresikan tingkat kepedulian tinggi terhadap beberapa isu tertentu¹⁵.

2.2. Teori gerakan sosial

Gerakan sosial (*social movement*), perlu dimulai dengan kejelasan konsep sehingga dapat diperoleh batasan dan koridor yang dimaksud dalam konsep tersebut. Berdasarkan pada anggapan bahwa gerakan sosial (*social movement*) merupakan tipe paling penting dari perilaku kolektif (*collective behavior*). Beberapa sosiolog menyebut gerakan sosial lebih sebagai suatu bentuk dari tindakan kolektif (*collective action*) daripada sebagai suatu bentuk perilaku kolektif (*collective behavior*). Sementara, terdapat juga sosiolog mengelompokkan gerakan sosial merupakan salah satu bentuk dari *collective behavior*. Sedangkan menurut Crossley, perilaku kolektif

¹⁴ Rajendra Singh, *Gerakan sosial Baru*, Resist, 2010, hal : 137

¹⁵ Zurcher dan Snow dalam (Andi Haris dkk, 2019, Mengenal Gerakan Sosial Dalam Perspektif Ilmu Sosial: *Hasanuddin Journal Of Sociology(HJS)*, vol.1, Issue.1 hal.17

merupakan salah satu dimensi dari studi gerakan sosial yang berkembang di eropa¹⁶.

Tindakan kolektif didefinisikan sebagai setiap tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan status, kekuasaan, atau pengaruh dari seluruh kelompok, bukan untuk seorang atau beberapa orang. Mengacu pada konsep Olson, maka inti dari konsep Tindakan sosial adalah adanya kepentingan umum atau kepentingan bersama (*public goods*) yang diusung diantara kelompok. Menurut Weber, suatu tindakan dikatakan terjadi ketika individu melekatkan makna subyektif dalam tindakan mereka. Kondisi seperti ini tidak muncul dalam konteks perilaku kolektif.¹⁷

Locher menyatakan bahwa perbedaan antara gerakan sosial dari bentuk perilaku kolektif yang lainnya, seperti: *crowd* (kerumunan), *riot* (kerusuhan), dan *rebel* (penolakan, pembangkangan), dapat dilihat dari tiga aspek, yakni: pengorganisasian (*organized*), pertimbangan (*deliberate*) dan daya tahan (*enduring*)¹⁸. Penjelasan ketiga aspek tersebut sebagai berikut:

¹⁶ Oman, Sukmana, 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, Malang: Intrans Publishing, hal.11

¹⁷ Oman Sukmana, Lok.cit

¹⁸ Ibid. Hal. 12

2.2.1. Aspek pengorganisasian

Gerakan sosial adalah suatu aktivitas yang terorganisir, sementara suatu perilaku sosial pada umumnya muncul atau terjadi tidak terorganisir. Misalnya pada partisipan suatu kerusuhan, mungkin saja diantara mereka melakukan kerjasama untuk jangka waktu yang singkat dalam suatu waktu tertentu, namun keterlibatan partisan dalam peristiwa kerusuhan tersebut bersifat bebas, sementara dan bukan merupakan kejadian yang secara hati-hati diorganisir. Tipikal partisan dan pemimpin dari suatu perilaku kolektif datang dan pergi dengan cepat. Dalam suatu perilaku kolektif tidak ada tugas-tugas khusus yang harus dilakukan oleh partisan, sementara dalam suatu gerakan sosial para partisan seringkali diberikan tugas-tugas khusus untuk ditampilkan, dimana mereka juga secara hati-hati merancang taktik dan strategi aksi. Dalam gerakan sosial, para pemimpin (*leaders*) seringkali merancang pekerjaan dan tugas-tugas khusus bagi para partisan gerakan.

2.2.2. Aspek pertimbangan

Suatu gerakan sosial juga terjadi karena adanya pertimbangan. Sebagian besar peristiwa perilaku kolektif terjadi tanpa adanya perencanaan apapun dari mereka terkait waktunya. Sementara gerakan sosial, secara intensif sengaja

di munculkan dan partisan secara hati-hati memutuskan apakah ikut atau tidak ikut dalam suatu gerakan. Keterlibatan para partisan seringkali didorong oleh janji-janji dan dorongan keanggotaan, gerakan sosial mencari publisitas dan berupaya untuk menarik sebanyak mungkin orang-orang untuk mendukung gerakan . pertimbangan perencanaan ini tidak terjadi pada sebagian besar bentuk dari perilaku kolektif.

2.2.3. Aspek daya tahan

Aksi gerakan sosial pada umumnya bertahan dalam waktu yang cukup lama atau memiliki daya tahan. Sementara suatu perilaku kolektif terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya suatu kerusuhan mungkin terjadi hanya beberapa menit, beberapa jam, atau beberapa hari saja. Sementara aksi gerakan sosial eksis untuk beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade.

2.3. Teori gerakan sosial baru

Teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement Theory*) merupakan suatu pendekatan teoritis terbaru yang menjelaskan tentang perubahan karakter dari Gerakan Sosial (*Social Movements*). *New Social Movements Theory* menekankan ciri khas gerakan sosial dalam perkembangan masyarakat pasca-industri (post-industrial) di Amerika Utara dan Eropa Barat. Teori Gerakan Sosial Baru (GSB) berakar dari tradisi Eropa Kontinental tentang teori sosial dan filsafat politik. Teori ini

merupakan suatu pendekatan sebagai respons terhadap kelemahan Marxisme klasik dalam menganalisis tindakan kolektif (*collective action*)¹⁹.

Bagi para teoritis Gerakan Sosial Baru (GSB), dua tipe tentang paham reduksi (*reductionism*) Marxisme klasik harus dicegah dari bentuk tindakan kolektif. Pertama, paham reduksi ekonomi Marxisme (*Marxism's economic reductionism*) yang menganggap semua faktor signifikan politik dari tindakan sosial berasal dari logika ekonomi fundamental tentang produksi kapitalis (*capitalist production*) dan logika yang lainnya yang membentuk tindakan tersebut. Kedua, paham reduksi kelas Marxisme (*Marxism's class reductionism*) yang menganggap bahwa hal yang paling penting dari aktor-aktor sosial didefinisikan oleh relasi-relasi kelas (*class relationships*) yang berakar dalam proses produksi dan identitas sosial lainnya yang membentuk aktor-aktor kolektif. Premis-premis ini mengarahkan Marxis kepada keistimewaan revolusi proletarian yang berakar dari iklim produksi dan mengesampingkan bentuk lain dari protes sosial.

Para teoritis Gerakan Sosial Baru (GSB) secara kontras memiliki cara pandang tersendiri tentang logika dari tindakan yang berbasis dalam politik, ideologi, dan kultur sebagai akar dari tindakan-tindakan kolektif (*collective actions*), dan sumber-sumber lainnya tentang identitas, termasuk etnisitas, jender dan seks yang memaknai identitas kolektif. Dengan demikian, Gerakan Sosial Baru (GSB)

¹⁹ Ibid. hal. 133

memiliki terminologi yang berbeda tentang tindakan kolektif yang menggantikan asumsi-asumsi dari Gerakan Sosial Lama (*Old Social Movement*) tentang revolusi proletarian yang dihubungkan dengan Marxisme Klasik. Meskipun teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) merupakan reaksi kritik terhadap Marxisme Klasik, namun beberapa teoritis Gerakan Sosial Baru berusaha meng-update dan merevisi asumsi-asumsi Marxis, sementara teoritis yang lainnya melakukan perubahan²⁰.

Meskipun istilah teori Gerakan Sosial Baru sudah berlaku umum, namun terdapat variasi pandangan dari beberapa teoritis. Berbagai pandangan teoritis Gerakan Sosial Baru tersebut dapat diidentifikasi tentang pendekatan umum (*general approach*) tentang konsep Gerakan Sosial Baru, sebagai berikut²¹:

Pertama, pada umumnya teori Gerakan Sosial Baru menggarisbawahi tindakan simbolik dalam masyarakat sipil atau lingkungan kultural sebagai arena untuk tindakan kolektif disamping tindakan instrumental dalam lingkungan politik atau Negara

Kedua, teoritis Gerakan Sosial Baru menekankan pada pentingnya proses yang mempromosikan *autonomy and self-determination*, bukan pada strategi untuk memaksimalkan pengaruh dan kekuasaan.

Ketiga, beberapa teoritis Gerakan Sosial Baru, menekankan pada peranan nilai-nilai *post-materialist* dalam banyak tindakan kolektif

²⁰ Oman Sukmana, Lok.Cit.

²¹ Ibid. Hal. 134.

komtemporer, sebagai lawan terhadap konflik atas sumberdaya material.

Keempat, teoritisi Gerakan Sosial Baru cenderung mempersoalkan proses yang rapuh dari konstruksi identitas kolektif dan identifikasi kelompok kepentingan, bukan pada asumsi bahwa konflik kelompok dan kepentingan mereka ditentukan secara structural.

Kelima, teori Gerakan Sosial Baru juga menekankan konstruksi sosial alami dari ketidakpuasan dan ideologi (*grievances and ideology*), daripada asumsi bahwa mereka dapat disimpulkan dari lokasi struktural kelompok.

Terakhir, teori Gerakan Sosial Baru mengakui adanya jaringan (*network*) yang bersifat tersembunyi, laten, dan temporal yang seringkali mendasari tindakan kolektif, ketimbang memahami bentuk organisasi yang terpusat (*centralized*) sebagai prasyarat keberhasilan mobilisasi beberapa dari tema ini menandai perbedaan baik dari teori Marxisme klasik dan teori mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*), serta dengan teori konstruksinisme sosial.

2.3.1. Karakteristik gerakan sosial baru

Menurut Pichardo, paradigma Gerakan Sosial Baru (GSB) secara fundamental memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan paradigm Gerakan Sosial Lama (*Old Social Movement*)²². Karakteristik khusus dari Gerakan Sosial Baru (GSB) dapat dilihat dari Empat aspek, yakni: (1)

²² Oman Sukmana, Lok, cit.

Ideology and goals (Tujuan dan Ideologi); (2) *Tactics* (Taktik); (3) *Structure* (Struktur); dan (4) *Participants of contemporary movements* (Partisipan dari Gerakan Kontemporer). Selanjutnya Pichardo memberikan penjelasan ke empat aspek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan ideologi

Faktor sentral karakteristik dari Gerakan Sosial Baru (GSB) adalah pandangan ideologi yang berbeda. Paradigma Gerakan Sosial Baru (GSB) mencatat bahwa Gerakan sosial kontemporer merepresentasikan keterputusan dari gerakan era industrial. Bukan memfokuskan pada redistribusi ekonomi (seperti yang dilakukan gerakan kelas-pekerja), Gerakan Sosial Baru (GSB) menekankan perhatian kepada kualitas hidup dan gaya hidup (*quality of life and life-style concerns*). Dengan demikian, Gerakan Sosial Baru (GSB) mempertanyakan kekayaan yang berorientasi tujuan materialistik dari masyarakat industrial. Mereka juga mempertanyakan struktur dari representasi demokrasi yang membatasi masukan dan partisipasi warga negara dalam pemerintahan, yang tidak mendukung demokrasi langsung (*direct democracies*), kelompok-kelompok swadaya (*self-help groups*), gaya kooperatif (*cooperative styles*) dari organisasi sosial. Nilai-nilai dari Gerakan Sosial Baru (GSB) berpusat dalam otonomi dan identitas (*outonomy and identity*).

Dalam banyak hal, klaim identitas adalah ciri paling khas dari Gerakan Sosial Baru (GSB), meskipun semua gerakan sebelumnya juga dapat digambarkan sebagai klaim yang mengekspresikan identitas. Beberapa penelitian yang mengkaji tentang bagaimana pengaruh (*impact*) dari identitas terhadap partisipasi dalam gerakan sosial telah dilakukan. Misalnya, Klandermans melakukan penelitian dalam Gerakan Perdamaian Belanda (*Dutch peace movement*) tentang bagaimana variasi identitas kolektif, yang diwakili oleh keanggotaan yang berbeda, memprediksi pembelotan partisipan dari gerakan. Selanjutnya, Pichardo, Catlin, dan Deane juga melakukan penelitian tentang identitas personal (*personal identity*) dalam relasi dengan partisipasi dalam gerakan lingkungan (*environmental movement*). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara signifikan ada hubungan antara identitas baik dengan aktivitas-aktivitas gerakan sosial konvensional (peristiwa partisipasi, keanggotaan organisasi, kontribusi gerakan) dan dalam perilaku sehari-hari (konservasi energi dan air, penggunaan transportasi alternatif, dan membeli produk yang terbuat dari bahan adur ulang). Untuk lebih jelasnya, diperlukan lebih banyak lagi penelitian empiris tentang kaitan (*connection*) antara identitas dan partisipasi gerakan.

Sifat unik yang lainnya, adalah sifat ideologi dari Gerakan Sosial Baru (GSB) yang merupakan karakter refleksi diri (*self-reflective character*). Hal ini berarti bahwa partisipan selalu mempertanyakan makna dari apa yang sedang dilakukan. Hal ini telah mengarahkan kepada pilihan sadar (*conscious choices*) tentang struktur dan aksi (*structure and action*), pilihan kata untuk melambungkan Gerakan Sosial Baru. Contoh yang baik dalam hal ini adalah meningkatkan karakteristik kesadaran kelompok dari gerakan feminis. Hal yang unik adalah bahwa orientasi ideologi dan karakter refleksi diri (*ideological orientation and self-reflexive character*) secara luas mendikte jenis-jenis dari taktik (*tactics*), struktur (*structures*), dan partisipan (*participants*) dalam Gerakan Sosial Baru.

2. Taktik

Taktik dari Gerakan Sosial Baru merupakan cerminan orientasi ideologi. Keyakinan dalam karakter yang tidak mewakili tentang demokrasi modern adalah konsisten dengan orientasi taktik anti institusi. Gerakan Sosial Baru lebih suka untuk tetap berada di luar saluran politik normal, menggunakan taktik mengganggu (*disruptive tactics*) dan memobilisasi opini publik (*mobilizing public opinion*) untuk mendapatkan pengaruh politik. Mereka juga cenderung menggunakan bentuk demonstrasi yang sangat dramatis dan

direncanakan dengan representasi simbol dan kostum (*costumes and symbolic representations*).

Namun demikian, tidak berarti bahwa Gerakan Sosial Baru (GSB) tidak melibatkan diri dalam politik, atau menghindar menjadi dilembagakan sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Eder, bahwa “Gerakan Sosial Baru suatu bentuk wujud dari protes kelas menengah (*middle-class protest*) yang berkaitan dengan upaya memberantas tekanan kelompok politik untuk gerakan sosial”. Beberapa Gerakan Sosial Baru (GSB) terintegrasi ke dalam sistem partai dan memperoleh akses reguler terhadap regulasi, implementasi, dan badan pengambilan keputusan, sementara yang lain telah membentuk partai politik yang teratur untuk kontes dalam pemilihan keterwakilan. Beberapa partai-partai Hijau (*Green parties*) adalah menonjol di Eropa, dengan beberapa memiliki manifestasi lokal di Amerika Serikat. Namun, tidak ada korespondensi langsung yang muncul antara pendukung Gerakan Sosial Baru dan mereka yang memilih partai-partai Hijau. Dengan demikian, paradigma Gerakan Sosial Baru mengakui bahwa tidak ada gaya taktik yang khas dari Gerakan Sosial Baru, lebih sekedar, opini publik dan politik anti institusi sebagai tambahan baru dan lebih menonjol dalam repertoar dari gerakan sosial.

3. Struktur

Namun demikian, tidak berarti bahwa Gerakan Sosial Baru (GSB) tidak melibatkan diri dalam politik, atau menghindar menjadi dilembagakan sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Eder, bahwa “Gerakan Sosial Baru suatu bentuk wujud dari protes kelas menengah (middle-class protest) yang berkaitan dengan upaya memberantas tekanan kelompok politik untuk gerakan sosial”. Beberapa Gerakan Sosial Baru (GSB) terintegrasi ke dalam sistem partai dan memperoleh akses reguler terhadap regulasi, implementasi, dan badan pengambilan keputusan, sementara yang lain telah membentuk partai politik yang teratur untuk kontes dalam pemilihan keterwakilan. Beberapa partai-partai Hijau (*Green parties*) adalah menonjol di Eropa, dengan beberapa memiliki manifestasi lokal di Amerika Serikat. Namun, tidak ada korespondensi langsung yang muncul antara pendukung Gerakan Sosial Baru dan mereka yang memilih partai-partai Hijau. Dengan demikian, paradigma Gerakan Sosial Baru mengakui bahwa tidak ada gaya taktik yang khas dari Gerakan Sosial Baru, lebih sekedar, opini publik dan politik antiinstitusi sebagai tambahan baru dan lebih menonjol dalam repertoar dari gerakan sosial.

Sehingga, mereka menyerukan dan menciptakan struktur yang lebih responsif terhadap individu; terbuka,

desentralis, dan non-hierarkis. Dimotivasi oleh pelajaran masa lalu, mereka berharap untuk menghindari menjadi dikooptasi. Ini adalah untuk klaim, bukan berarti bahwa semua Gerakan Sosial Baru begitu terorganisir, tetapi bahwa bentuk pengorganisasian yang lebih menonjol dari pada di masa lalu. Tipe ideal gaya organisasi dari Gerakan Sosial Baru tidak harus dilihat sebagai organisasi yang mencerminkan gaya dari setiap Gerakan Sosial Baru. Kelompok seperti Organisasi Nasional Perempuan (*the National Organization of Women*) dan berbagai lingkungan kelompok kerja lebih tradisional terpusat, bentuk hirarkis dari organisasi.

4. Partisipan

Terdapat dua pandangan tentang siapa dan mengapa partisipan bergabung dalam suatu gerakan sosial baru. Basis pertama dukungan dari kelas menengah baru (*new middle class*), yakni sebuah strata sosial pekerja baru yang muncul dalam sektor ekonomi non-produktif. Peningkatan kelas menengah baru dalam masyarakat pascaindustri (*postindustrial society*) membangun basis dukungan partisipan Gerakan Sosial Baru. Akan tetapi, teoritis gerakan sosial baru melangkah melampaui basis kelas menengah baru ini, melalui argumenasi bahwa strata ini memproduksi partisipan gerakan sosial baru apabila

mereka tidak terikat pada motif keuntungan perusahaan atau tidak tergantung pada dunia usaha demi mempertahankan hidup mereka. Dukungan kelas menengah terhadap Gerakan Sosial Baru lebih muncul dari mereka yang cenderung bekerja di wilayah yang sangat tergantung pada pengeluaran Negara seperti akademisi, seniman, dan agen-agen pelayanan kemanusiaan, dan mereka cenderung harus berpendidikan tinggi.

Pandangan kedua tentang partisipan dalam gerakan sosial baru adalah bahwa mereka tidak didefinisikan oleh batas kelas tetapi ditandai oleh perhatian umum atas isu-isu sosial. Basis partisipan Gerakan Sosial Baru adalah ideologi, bukan etnis, agama, atau komunitas berbasis kelas (*class-based community*). Mereka didefinisikan oleh nilai-nilai umum daripada struktur lokasi. Offe menawarkan pandangan yang berbeda tentang siapa partisipan dari gerakan sosial baru. Menurutnya, partisipan dari gerakan sosial baru dapat digambarkan dari tiga sektor, yakni: kelas menengah baru (*new middle class*), elemen-elemen dari kelas menengah lama (seperti petani, pemilik toko, dan produser artis), dan populasi periferi yang terdiri dari orang-orang yang tidak banyak terlibat dalam pasar kerja (seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pensiunan). Hasil studi terhadap gerakan lingkungan menunjukkan bahwa partisipan

gerakan sosial baru dapat digambarkan dari dua populasi, yakni kelas menengah baru (*new middle class*) dan komunitas secara geografis yang dipengaruhi secara langsung oleh eksternalitas negatif dari pertumbuhan industri. Partisipan adalah kelas menengah yang lebih berkomitmen ideologis seperti halnya komunitas yang memprotes bahaya sampah, atau limbah kimia beracun dari lingkungan lokal.

2.4. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan dan Kegagalan Gerakan Sosial

Menurut Locher terdapat beberapa faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu gerakan sosial. Menurutnya, mengacu kepada sejarah pola gerakan sosial di Amerika, maka ditemukan Lima faktor (karakteristik) yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu gerakan sosial²³, yaitu;

2.4.1. *Leadership: Effective Leadership* (Kepemimpinan: Kepemimpinan yang Efektif)

Syarat keberhasilan suatu gerakan sosial adalah harus memiliki pemimpin yang efektif (*effective leaders*), yaitu individu-individu yang memahami sistem hukum dan politik yang berfungsi efektif dalam diri mereka. Para pemimpin gerakan sosial memusatkan perhatian kepada tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari kelompok. Mereka

²³ Ibid. Hal. 34

mengartikulasikan untuk menjelaskan kepada pihak-pihak luar (*outsiders*) tentang rasionalitas dan tujuan kelompok. Hal yang paling penting dari pemimpin gerakan sosial adalah kemampuannya dalam memberikan inspirasi kepada orang lain untuk bertindak. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mengajak orang-orang untuk mengikuti aksi gerakan sosial mereka dan berbuat sebagaimana yang harus dilakukan. Kepemimpinan yang efektif mampu meningkatkan peluang bahwa setiap gerakan sosial akan berhasil dalam mencapai beberapa tujuan yang diinginkan.

2.4.2. Image: Positive Image (Citra: Citra Positif)

Keberhasilan gerakan sosial adalah apabila dihargai (mendapatkan respek). Mereka berusaha untuk meyakinkan semua pihak termasuk para politisi dan pemegang otoritas bahwa mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur yang hanya menginginkan suatu kebenaran. Citra publik tentang kelompok dan pemimpin kelompok gerakan harus positif. Kondisi seperti ini akan memudahkan untuk mendapatkan dukungan keyakinan publik (pengamat) bahwa gerakan tersebut bersifat rasional dan mulia.

2.4.3. *Tactics: Socially Accepted Tactics* (Taktik: Taktik yang Dapat Diterima secara Sosial)

Suatu gerakan sosial akan berhasil apabila menggunakan taktik-taktik yang dapat diterima secara sosial. Bahwa taktik dan strategi yang dipilih dapat diyakini akan mampu dan efektif dalam rangka mencapai tujuan gerakan. Kondisi *Socially Accepted Tactics* akan memberikan dampak terhadap pembentukan rasa hormat dan citra positif dari publik.

2.4.4. *Goals: Socially Acceptable Goals* (Tujuan: Tujuan yang Dapat Diterima Secara Sosial)

Suatu gerakan sosial akan berhasil apabila pihak luar (*outsiders*) merasa yakin bahwa tujuan utama gerakan sosial adalah hanya untuk kepentingan masyarakat, dan tidak bermaksud merugikan kepentingan mereka. Para aktor gerakan sosial harus berusaha meyakinkan pihak pengamat (*bystanders*) bahwa seluruh masyarakat akan mendapatkan keuntungan jika gerakan sosial berhasil mendapatkan sebagaimana yang diinginkan. Persuasi seperti ini akan menjaga pengamat (*bystanders*) yang netral dari kemungkinan berubah dan masuk menjadi lawan (*opponents*) gerakan sosial, dan juga dapat meyakinkan mereka bahwa mereka memiliki kepentingan atau keuntungan yang positif dalam keberhasilan sebuah gerakan sosial. Gerakan sosial yang berhasil memiliki tujuan khusus

jangka pendek (*shortterm*) dan jangka panjang (*long-term*). Suatu gerakan sosial mungkin berbicara tentang “membuat masyarakat lebih baik” (*making a better society*) atau “meningkatkan kehidupan” (*improving life*), akan tetapi upaya mereka sehari-hari difokuskan kepada tahap-tahap nyata terhadap tujuan-tujuan spesifik. Semakin sesuai tujuan-tujuan ini dengan ideologi sosial yang dominan, semakin memungkinkan orang luar (*outsiders*) memahami tujuan-tujuan ini sebagai sesuatu yang rasional. Sebagai contoh, jika suatu gerakan sosial dapat meyakinkan pihak luar (*outsiders*) bahwa tujuan politik khusus dari gerakan sosial sesuai dengan kondisi ideal warga Amerika seperti: kebebasan (*freedom*), kemerdekaan (*liberty*), dan persamaan (*equality*), maka besar kemungkinannya gerakan sosial tersebut untuk mendapatkan dukungan dari pihak pengamat (*bystander*). Masyarakat umum Amerika mungkin akan mendukung suatu gerakan sosial karena didasarkan atas perasaan keadilan (*justice*) dan demokrasi (*democracy*).

2.4.5. Support: Cultivated Financial and Political Support (Dukungan: Pembudayaan Dukungan Politik dan Finansial).

Kebanyakan kelompok-kelompok Gerakan sosial memperoleh dukungan politik dan dana dari jaringan kelompok, organisasi, dan institusi yang lainnya. Kebanyakan gerakan

sosial yang berhasil, memadukan teknik dan pesan mereka untuk menghindari keterasingan dari pend-ukung politik dan finansial potensial yang memungkinkan. Sementara gerakan sosial yang gagal (*unsuccessful*), di lain pihak, menyerang secara membabi buta semua orang termasuk pendukung potensial, baik politik maupun finansial. Hal ini seringkali menyebabkan penguatan oposisi dan penarikan (*withdrawal*) dukungan dari para supporters (*partisipan*).

2.5. Penelitian terdahulu

-Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agus Lukman hakim, dalam penelitiannya yang berjudul "*Kajian kebijakan sumber daya alam berbasis pada ekologi politik*".²⁴ Tulisan ini menggunakan analisis deskriptif dengan basis tinjauan pustaka. Persamaan dengan penelitian yang telah penulis lakukan adalah menggunakan analisis deskriptif, meskipun pada penelitian sebelumnya mengumpulkan data dengan studi pustaka sedangkan penelitian ini akan menggunakan metode wawancara. Perbedaan selanjutnya adalah, teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu menggunakan teori ekologi politik, sedangkan penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial. Hal yang hendak dicari oleh Lukman Hakim adalah penyebab kurang maksimalnya pengelolaan Sumber daya alam. Hasil analisisnya menunjukkan kajian pengelolaan sumberdaya alam selalu fokus kepada

²⁴ Agus Lukman Hakim, 2018, *Kaj-ian Kebijakan Sumberdaya Alam Berbasis pada Ekologi Politik*, *IJPA- The Internati-onal Journal of Public Administratioan*, Vol.4, No.2.

implementasi dan evaluasi kebijakan padahal optimal dan kurang optimalnya suatu kebijakan banyak ditentukan oleh formulasi kebijakan yang baik. sedangkan penelitian yang telah saya lakukan menggunakan logika implementasi kebijakan sebagai cara untuk mencapai tujuan kebijakan juga sebagai elemen penjabar bahwa implementasi kebijakan ada hubungannya dengan gerakan mahasiswa.

Selanjutnya penelitian yang pernah dilakukan oleh Maya Sarah dan Wahyu Subadi, dalam penelitiannya yang berjudul "Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Musukau Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong".²⁵ Penelitian ini dikerangkai dengan teori pembuatan kebijakan dan metode evaluasi kebijakan dari William N. Dunn. Persamaan dengan penelitian yang telah penulis lakukan terletak pada objek penelitiannya sama-sama melihat kebijakan terhadap pembangunan infrastruktur. Letak perbedaannya yakni, penelitian yang telah dilakukan dikerangkai dengan teori gerakan sosial. selanjutnya pada penelitian terdahulu ingin melihat bagaimana kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa Musukau sedangkan penelitian yang telah saya lakukan melihat peran mahasiswa dalam mendorong kebijakan pembangunan jalan poros Salutambung-Aralle yang ada di Sulawesi Barat, Kabupaten Majene.

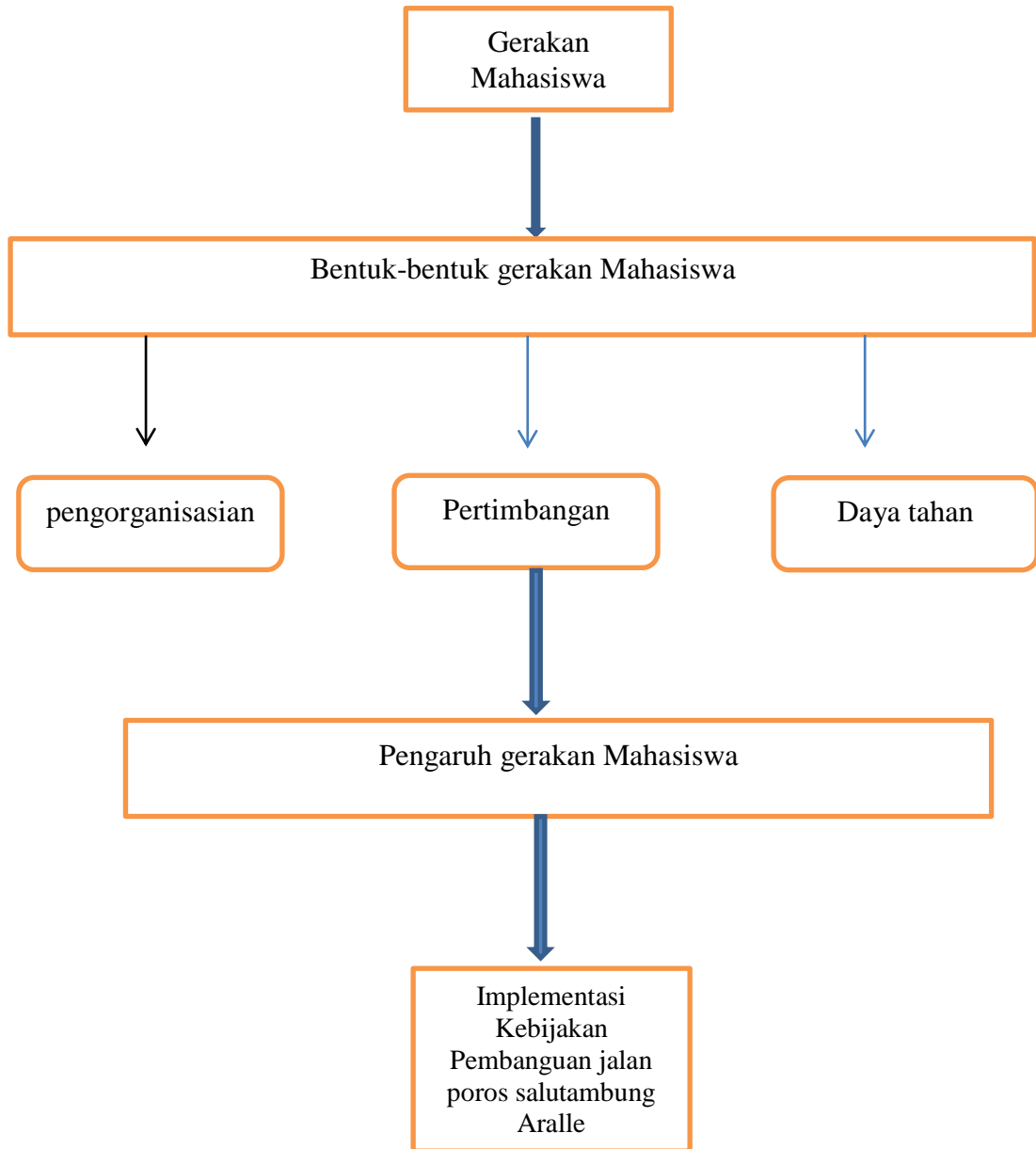
Riset yang lain juga pernah dilakukan oleh Rivan Amri Grendi Hendrastomo, dalam penelitiannya yang berjudul "Dinamika Gerakan

²⁵ Maya Sarah dan Wahyudi Subadi, 2021 Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Musukau Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, *JAPB*, Vol.4, No.2.

Kritis Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta”.²⁶ jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara dan observasi. Penelitian ini memiliki subyek yang sama dengan penelitian yang telah saya lakukan yaitu “Mahasiswa” tetapi dalam penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk menggambarkan peran mahasiswa dalam mengedukasi masyarakat tentang bagaimana bertindak dan berfikir secara kritis, sedangkan pada penelitian yang telah penulis lakukan lebih kepada implementasi fungsi dan peran mahasiswa yang digambarkan dalam penelitian terdahulu.

²⁶ Rivan Amri dan Grendi Hendrastomo, 2016, *Dinamika Gerakan Kritis Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta*, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, edisi 5, No.1.

2.4. Skema pikir



Skema fikir di atas menggambarkan logika dan alur penelitian yang di fokuskan pada gerakan mahasiswa dengan berbagai bentuk-bentuk gerakan yang dilakukan. Gerakan mahasiswa tersebut kemudian dianalisis menggunakan konsep dan teori gerakan sosial (Tindakan

kolektif) khususnya gerakan sosial baru. Berdasarkan teori gerakan sosial, ada beberapa poin yang akan dilihat dari gerakan Mahasiswa tersebut antara lain: aspek pengorganisasian, pertimbangan, serta daya tahan. Setelah menganalisis gerakan tersebut, selanjutnya akan dilihat bagaimana pengaruh gerakan yang dilakukan oleh Mahasiswa dalam mendorong implementasi kebijakan pembangunan jalan poros Salutambung-Aralle.